



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Selasa, 19 Januari 2016 06:00

JMP Tersambung, Maret Diresmikan



AMBON - Sempat molor dari jadwal, mainclosure atau bentangan tengah Jembatan Merah Putih (JMP) akhirnya terpasang. Pemasangan bentangan tengah JMP yang menghubungkan Desa Poka dan Galala di kawasan Teluk Ambon ini dilakukan, Senin (18/1) pukul 23.20 WIT.

Pemasangan kerangka baja yang akan digunakan sebagai dek untuk pembuatan bakesting pengecoran disaksikan langsung oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Maluku, Ismail Usemahu, sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemprov Maluku dan perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku dan Maluku.

Gubernur usai pemasangan bentangan tengah JMP mengatakan, bentangan tengah yang selama ini dinantikan masyarakat akhirnya telah terpasang. Dengan demikian, hambatan utama pembangunan proyek JMP sudah selesai. Seminggu ke depan, penyambungan JMP semuanya rampung.

“Bentangan tengah JMP yang selama ini dinantikan warga sudah tersambung. Itu berarti hambatan paling utama sudah bisa kita selesaikan malam ini (tadi malam), tinggal seatclosure yang terletak pada jalur Poka dan Galala yang belum terpasang. Jika tidak ada halangan membutuhkan waktu satu minggu ke depan sudah selesai terhitung mulai dari sekarang,” ungkap Gubernur kepada wartawan di lokasi JMP, tadi malam.

Menurutnya, untuk seatclosure yang terletak dari arah Poka, bahan materialnya telah disiapkan. Sedangkan dari arah Galala belum disiapkan. Untuk penyambungan membutuhkan waktu pekerjaan sepekan.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

“Kita berharap di minggu-minggu yang akan datang semua pekerjaan utama JMP sudah bisa selesai. Mungkin sampai akhir Februari untuk pembersihan, perapian dan semua sudah selesai,” yakin Gubernur.

Mantan Wagub Maluku itu optimis, pada Maret 2016, JMP yang menjadi icon Maluku ini siap diresmikan Presiden Joko Widodo. “Kalau akhir Februari selesai, maka Maret 2016, saya akan minta kepada Menteri PU untuk bisa mengundang Pak Presiden meresmikan JMP. Jadi keraguan (penyelesaian proyek JMP) selama ini bisa terjawab dan di kesampingkan,” jelasnya.

Menurutnya, keuntungan dari kehadiran JMP ini adalah akses jalan menuju Bandara Internasional Pattimura Ambon sangat dekat atau membutuhkan waktu sangat singkat sampai ke bandara. Keberadaan JMP memudahkan akses 25 ribu mahasiswa menuju kampus Universitas Pattimura yang berada di kawasan Poka.

Tentunya keberadaan JMP kata gubernur, mendorong pengembangan wilayah di kawasan Teluk Ambon. “Ada banyak keuntungan dengan kehadiran JMP, namun yang paling utama adalah pengembangan wilayah. Kepadatan yang cukup tinggi di Kota Ambon saat ini bisa dipindahkan ke daerah jahir Leihitu dari Poka atau dari Galala,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, berbagai hambatan menyertai pembangunan JMP yang dimulai pada 17 Juli 2011. Mega proyek ini sebelumnya ditargetkan rampung akhir Januari 2016. Proyek dianggarkan melalui APBN menelan anggaran sekitar Rp 500 miliar lebih.

JMP yang dibangun dengan sistem cable stayed ini diharapkan dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari Kota Ambon menuju Bandara Pattimura yang berjarak sekitar 35 Km dan sebaliknya, sehingga membantu efisiensi dan efektivitas kegiatan masyarakat dan pemerintah daerah. (MG4)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Rabu, 20 Januari 2016 06:00

UE “Lebih” Perhatian pada Perdamaian Maluku



AMBON - Maluku khususnya kota Ambon, kerap disebut laboratorium kerukunan umat beragama. Daerah yang telah pulih dari imbas kerusuhan sektarian 19 Januari 1999 silam ini, oleh Uni Eropa (UE) diperhitungkan sebagai model manajemen penyelesaian konflik. Bukan saja bagi Indonesia tapi juga dunia.

Dan pelajaran penting dari konflik tersebut yaitu, munculnya para provokator damai. Mereka lah yang berperan mengakhiri konflik Maluku di masa lalu.

“Kami berharap teman-teman mampu menjadi provokator damai. Kembali ke daerah menyebarkan prinsip-prinsip perdamaian, untuk ciptakan Ambon dan Maluku yang semakin damai. Karena kita semua tak ingin konflik Ambon terjadi lagi,” imbau Saiti Gusrini, Project Officer European Instrument for Democracy and Human Rights, Uni Eropa, Selasa (19/1).

Setidaknya 20 fasilitator perdamaian dilatih selama tiga hari dalam pelatihan di Hotel Amaris, kemarin. Para tokoh masyarakat dan agama itu dilatih memfasilitasi dialog dan mediasi damai.

Di hadapan peserta pelatihan dialog dan mediasi konflik tersebut, Gusrini juga menegaskan, Uni Eropa tidak mempunyai kepentingan politik di Maluku. Termasuk separatisme, Uni Eropa memilih untuk menjauhi isu-isu semacam itu.

“Sebab kita melihatnya lebih kepada persoalan domestik Indonesia,” ujarnya diplomatis.

Menurut dia Uni Eropa konsern terhadap perdamaian di Maluku. Perhatian Uni Eropa terhadap hal ini tidak tanggung-tanggung. Sejak aktif mendukung perdamaian di level masyarakat lokal, Uni Eropa sudah menggelontorkan anggaran mencapai Rp 13 juta Euro sejak tahun 2012. Hanya untuk penguatan demokrasi, monitoring penegakkan hukum dan HAM, dan dialog damai.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Pendeta Attes Werinussa dari Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Maluku menyatakan, kerukunan merupakan kebutuhan masyarakat. Dan kerja membangun kerukunan bukan saja pada pundak tokoh agama dan masyarakat tapi semua pihak. Dia merespon peran serta Uni Eropa mendukung perdamaian di Maluku sebagai satu hal yang patut diapresiasi, karena datang dari luar Indonesia.

Ketimbang pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Maluku, dia menilai Uni Eropa lebih perhatian. FKUB yang merupakan ujung tombak kerukunan antar umat beragama di Maluku terkesan diperlakukan sekedar, “pemadam kebakaran”. Dibutuhkan oleh pemerintah daerah di saat-saat genting. Sementara pemberdayaan untuk para tokoh agama dan masyarakat ini sering terabaikan. Dukungan anggaran Kementerian Agama RI dan Pemprov Maluku per tahun senilai Rp 150 juta dinilai minim untuk mengcover semua daerah di Maluku dengan geografis kepulauan.

“Kami lihat ini kesempatan yang sangat istimewa dan strategis dari Uni Eropa. Dan kami komit untuk hasilkan mediator-mediator (damai) yang baru,” kata Sekretaris FKUB Maluku itu.

Upaya penguatan kapasitas masyarakat sipil (CSO) di Maluku, didukung Uni Eropa, Habibie Center, Yayasan Hendry Dunant, Institut Tifa Damai Maluku dan FKUB Maluku merupakan, implementasi dari MoU yang ditandatangani 4 Desember 2015 lalu.

“Kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat saling mendukung, memelihara dan mengembangkan kerukunan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus Ambon, Maluku,” tandas Mohammad Anshori, Project Leader The Habibie Center.

Hingga sekarang kegiatan yang sudah dilaksanakan sebanyak 6 sesi dialog dan satu sesi training. Dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mediasi bagi FKUB, lembaga lintas agama dan LSM yang bekerja membangun perdamaian di Maluku dan Ambon.

Ditargetkan hingga penghujung tahun 2016 dilaksanakan 3 sesi dialog dan 2 sesi pelatihan. Diharapkan program dimaksud dapat membentuk jaringan aktor perdamaian lintas agama yang terlatih guna mencegah dan merespon terjadinya konflik lokal. Diharapkan, jaringan yang terbentuk memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap pemicu konflik. Maupun dialog dan mediasi damai dari konflik yang muncul. (KTA)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

20 Jan 2016

Penyidik KPK Periksa Bos Windhu

JAKARTA - Bos PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir dipanggil penyidik KPK, Selasa (19/1), kemarin untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pembahasan pengamanan proyek jalan di Pulau Seram, Maluku.

Proyek itu, akan dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR) tahun anggaran 2016. Ia merupakan pihak yang memberi suap.

Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andrianti mengatakan Khoir akan diperiksa untuk tersangka anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti.

Dalam perkara ini, Khoir juga sudah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu. Pemeriksaan Khoir ini merupakan yang perdana setelah ditahan beberapa hari lalu.

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DWP (Damayanti Wisnu Putranti,” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati ketika dikonfirmasi, wartawan, Selasa (19/1), kemarin. Dia juga membantah terkait desas-desus bahwa Kapala Balai Jalan dan Jembatan Maluku, Maluku Utara ditangkap.

Berdasarkan data, Abdul Khoir sudah banyak dikenal kalangan pengusaha jasa konstruksi di Provinsi Maluku. Bahkan dia mendapatkan julukan si raja proyek jalanan. Hal itu didapatkan Khoir lantaran keahliannya melobi. Perusahaan milik Abdul memonopoli proyek-proyek di BBPJN wilayah Maluku dan Maluku Utara, hampir 10 tahun terakhir.

Proyek-proyek jalan yang telah dikerjakan perusahaan Abdul Khoir tersebar dari Kabupaten Maluku Tenggara hingga Pulau Seram yang meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur.

Perusahaannya pun terletak di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, PT Windhu Tunggal Utama. Kemudian Jln Angsana, RT 03 RW 05 kawasan Aster, Kelurahan Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kantor itu terletak di tengah kota.

Kantor yang berada di Blok M itu sebelumnya digeledah KPK pada Jumat (15/1/2016). Selain kantor itu, sejumlah tempat juga digeledah diantaranya, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Pera di Kebayoran Baru, serta tiga ruangan kerja Damayanti, Budi Supriyanto Fraksi Partai Golkar, serta Yuddy Widiana Adia Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di kompleks parlemen.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Dari penggledahan itu penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan elektronik (Harddisk). Kini barang yang telah diamankan itu tengah didalami penyidik KPK.

Kasus itu terbongkar dari hasil tangkap tangan oleh satgas KPK terhadap sejumlah pihak di beberapa tempat beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan intensif, KPK kemudian menetapkan empat tersangka.

Tiga diantaranya sebagai penerima suap, yakni anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti serta dua orang dari pihak swasta Julia Prasrtyarini atau uwi dan Dessy A Edwin. Sedangkan pemberi suap adalah Abdul Khoir selaku Dirut PT Windu Tunggal Utama (WTU).

Pemberian uang suap ini diduga untuk melancarkan suatu proyek di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemenpupera) tahun anggaran 2016 dengan perkiraan total nilai suap SGD 404.000 dari barang bukti yang berhasil diamankan SGD99.000.

Untuk penerima suap, mereka disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **(ILC)**



Selasa, 26 Januari 2016 06:00

Akademisi Unpatti “Kepung” SKK Migas Soal Masela

AMBON - Sejumlah akademisi menyatakan kekesalan terhadap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait pengelolaan Blok Migas Masela. Mereka mengaku, Unpatti selama ini tidak pernah dilibatkan dalam kajian blok abadi itu.

Padahal, menurut mereka pengelolaan Migas Masela di darat atau onshore sangat menguntungkan masyarakat setempat.

Ini tercermin saat SKK Migas dan Unpatti menggelar Focus Group Discussion Multiplier Effect Proyek Pengembangan Lapangan Masela di lantai IV gedung Rektorat Unpatti, kemarin. “Sesuai perintah undang-undang itu masyarakat mesti disejahterakan dalam pengelolaan Migas. Kita mesti konsisten dengan UU. Nah, hak masyarakat adat setempat juga mesti diperhatikan,” kata Prof Aholiab Watloly.

Apalagi, lanjut dia, musyawarah besar masyarakat Maluku telah sepakat pengelolaan Masela dilakukan di darat. “Nah, jangan dimainkan lagi. Nah, coba lihat peta dari SKK Migas kepulauan Babar dan Tanimbar sangat dekat dengan Migas itu. Apalagi, pulau-pulau ini masuk daerah perbatasan,” kata Watloly sambil menuju ke peta untuk menunjukkan letak Migas terbesar di Asia Tenggara itu.

Dia kemudian memprotes hasil kajian dari Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, ITB dan ITS. “Masak proyek sebesar ini hasil kajian seperti itu. Saya malu dan ragukan sebagai akademisi dan guru besar. Saya curiga hasil studi atau kajian demi kepentingan operator Blok Masela. Ini sangat memalukan sehingga kami akan protes ke Rektor sejumlah universitas itu,” terangnya.

Akademisi Unpatti, Abraham Tulalessy menambahkan, sebagai pemilik Blok Masela tidak pernah dilibatkan sejak awal. “Kami telah dilecehkan. SKK Migas dan Menteri permalukan kita. Ini pelecehan. Saya minta hormati kami masyarakat Maluku. Jangan buat kami berontak,” kesalnya.

Dia berharap, kedepan Maluku memiliki SKK Migas sendiri. Dia mencontohkan, Provinsi Aceh memiliki SKK Migas sendiri. “Kalau di Aceh Migas lebih dari 12 mil laut mereka dapat 30 persen. Sementara dibawah 20 persen mil laut Aceh sebagian 70 persen. Ini khan tidak adil,” kesalnya.

Rektor Unpatti, Tomi Pentury mengatakan, ada langkah maju dalam menggelar diskusi terkait multiplier effect Migas Masela dengan SKK Migas. “Jadi diskusi ini kelanjutan dari janji Menteri ESDM bahwa kita akan bersama dengan perguruan tinggi dalam hal ini Unpatti untuk mendiskusikan kalau proyek ini dikembangkan efeknya untuk sosial dan budaya dan lainnya,” kata Pentury kepada sejumlah wartawan.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Dia mengaku, sebagai Rektor berharap dialog dibangun dalam nuansa akademik dengan pikiran akademis.”Walaupun dalam diskusi agak keras lebih ramai karena emosi kultur masih ada. Dan itu hal biasa. Kami berharap agar kita bisa gunakan rasionalitas akademik untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini sebetulnya multiplier effect seperti apa. Itu intinya,” jelasnya.

Soal studi atau kajian Migas Masela sebelumnya tidak melibatkan Unpatti, dia mengaku, studi kelayakan yang dilakukan sejumlah perguruan tinggi maka sebagai perguruan tinggi negeri di Maluku, juga keberatan.”Kami berharap ada studi perbandingan. Studi perbandingan yang dilakukan untuk membandingkan hasil studi mereka. Kita juga punya ahli dan data empiric yang banyak dibanding mereka. Tadi ada menggunakan data sekunder. Pada sisi validasi dan rehabilitasi hasil teman-teman membantah itu. Ini dialog akademik,” paparnya.

Dia mengaku, ada hak untuk menolak dan punya data dan argumen.”Dalam waktu dekat akan lakukan kajian. Jadi saya tidak lihat laut dan darat. Tapi efeknya seperti apa kalau di laut atau di darat. Kalau di laut efek besar bagi masyarakat kita ambil. Tapi kalau di darat efeknya baik bagi masyarakat kita ambil,” pungkasnya. **(KTM)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Kamis, 28 Januari 2016 00:08

BKN Turun Tangan Usut Kasus Calo PNS di Ambon

AMBON - Kasus penipuan bermodus SK PNS palsu beromset ratusan juta rupiah yang dilakukan dua oknum PNS Pemda Maluku Lea Maria Lekipuw dan Neltje Tempessy ikut mendapat perhatian Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

Untuk mengusut kasus tersebut, tim BKN turun langsung ke Ambon. Mereka beranggotakan empat, menyambangi Polres Ambon, Rabu, (28/1), kemarin, sekitar pukul 09.00 WIT. Di Polres mereka menemui Kasat Reskrim Polres Ambon, AKP Theodorus Priyo Santosa.

Ke-empat Tim BKN diketuai Inspektur BKN RI Bidang Disiplin PNS Farel Simarmata dan tiga anggotanya, Paulus D,Laksono. H, Adam Candra S dan Sulthoni.

Menurut Simarmata, kehadiran mereka di Ambon untuk menelusuri kasus penipuan yang dilakukan dua oknum PNS Pemda Maluku. Selain itu, kehadiran mereka juga ingin mengungkap berapa banyak uang yang diterima dari hasil penipuan termasuk berapa jumlah korban penipuan.

Tak hanya itu, Farel mengaku, kedatangan mereka ke Ambon juga ingin mengetahui bukti-bukti apa yang sudah didapat dari hasil penyelidikan polisi terkait kasus tersebut.

“Tujuan kita datang untuk menelusuri penipuan SK palsu oleh oknum PNS Provinsi Maluku. Kita mau telusuri berapa korban dan berapa banyak uang yang didapat oleh pelaku. Bukti-bukti apa yang sudah didapat, terutama terkait SK atau kwitansi palsu tapi yang asli,” kata Simarmata kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, jika penyidik Polres Ambon menemukan bukti-bukti kuat, maka pihaknya akan mendorong Pemda Maluku agar segera menindak oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini.

“Kita akan menjelaskan mengenai aturan kepegawaian dan mendorong Pemda menindak oknum yang bersangkutan. Tentu disertai dasar hukum berupa alat bukti terutama SK palsu tetapi yang asli. Karena kalau foto kopi itu kan tidak bisa, kita cari yang aslinya,” terangnya.

Dari hasil pertemuan dengan Kasat Reskrim, tambah ketua tim itu, ternyata belum semua korban yang datang melaporkan kasus ini. Padahal, ada sekitar 40 korban yang diketahui telah ditipu oleh dua oknum tersebut.

“Ternyata belum semua melapor. Polres mau kita bantu agar menghimbau kepada semua korban datang melapor dengan membawa bukti-bukti seperti SK dan kwitansi palsu yang asli,” terangnya di ruang SPKT Polres Ambon.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Kedua oknum ini, lanjut lelaki berkacamata itu, sudah dua kali melakukan hal serupa (Penipuan). Tahap pertama, tahun 2011-2012. Dimana lima orang menjadi korban aksi tersebut. Kala itu, mereka (pelaku) hanya menggunakan modus janji-janji dan meraup uang senilai Rp 124.000.000. Sempat terbongkar ketika itu, namun pelaku mengembalikan uang korban sehingga kasus ini tidak diteruskan ke pihak kepolisian.

“Ini kan dua tahap, tahap pertama tahun 2011-2012, itu ada lima orang korban. Uang yang dikumpulkan sebanyak Rp 124 juta dari lima orang. Kebongkar waktu itu lalu dipulangkan uang (korban), sehingga tidak melapor,” terangnya.

Dia melanjutkan, insiden yang sama kemudian terulang dengan modus baru yakni membuat SK palsu, sejak tahun 2013-2015. Pelaku menerbitkan SK palsu kepada 40 korban. SK ini diketahui palsu dari Kop Pemda dan isinya tidak benar.

“SK semuanya palsu, mulai dari Kop Pemdanya dan isinya gak benar. Isinya yang dibikin asal-asalan saja,” terangnya.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan, umumnya semua korban dijanjikan akan diangkat sebagai PNS di sejumlah instansi di Pemerintah Daerah Maluku. Diduga, ada kaki tangan pelaku juga yang bermain di lingkup pemerintah Kota Ambon maupun Kabupaten.

“Jadi bukan hanya di kota Ambon dan Kota Kabupaten, tetapi di lingkup Pemprov ada yang bermain ada sejumlah kaki tangannya, karena ada juga yang ngecaloin di bawah,” ujarnya.

Dia mengaku, setelah dari Polres pihaknya akan menuju kantor BKD Maluku untuk meminta pihak BKD menyampaikan himbauan kepada korban lainnya agar segera melapor dan membawa bukti asli sehingga bisa segera diselesaikan.

Dikatakan, bila bukti-buktinya sudah terkumpul, maka oknum tersebut akan dipecah secara tidak terhormat. Untuk saat ini, tambahnya lagi, kedua oknum tersebut bisa langsung diberhentikan sementara, sepanjang sudah ada beberapa bukti asli (SK palsu) tanpa menunggu hasil putusan dari pengadilan.

“Terkait pemberhentian bisa juga dilakukan sekarang asalkan ada bukti. Tidak harus menunggu pengadilan. Minimal diberhentikan sementara dulu sepanjang sudah ada surat penahanan dari kepolisian,” pungkasnya.

Sementara itu, dua oknum pegawai negeri sipil(PNS) di lingkup Pemprov Maluku yang terlibat skandal pembuatan surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai untuk sementara telah dinoaktifkan.

“PNS berinisial LML dan rekannya TM saat ini sudah berstatus tahanan kota setelah diamankan aparat kepolisian dari Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Setda Maluku, Maritje Lopulalan di Ambon, Rabu.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Penjelasan Maritje disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi A DPRD Maluku dipimpin ketua komisi, Melkias Frans. Komisi A mengundang Kepala BKD Provinsi Maluku untuk mempertanyakan masalah penerbitan SK palsu oleh kedua tersangka yang kini sementara ditangani aparat kepolisian.

Menurut Maritje, tersangka LML adalah PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku, sementara rekannya NT merupakan pegawai RSUD dr. M. Haulussy Ambon.

Aksi mereka sebagai makelar SK pengangkatan PNS terungkap sejak 19 Januari 2016. Padahal sebelumnya telah diberikan teguran keras. Karena jumlah korban yang didatangi mereka sekitar 20-an orang, tetapi yang baru melapor ke Polres Ambon belum sampai sepuluh orang.

Korban yang umumnya merupakan pencari kerja ini dipatok Rp30 juta hingga Rp40 juta/orang dengan iming-iming akan diangkat sebagai PNS dan bekerja pada dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, dinas perhubungan atau instansi terkait lainnya di Maluku. (MG4)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

29 Jan 2016

Laporan Dana Desa Bikin Pusing Kepala Desa

AMBON-Kepala Pemerintahan (raja) di sejumlah desa di kota Ambon masih kebingungan untuk membuat laporan dana desa tahun anggaran 2015 yang akan di pertanggungjawabkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Bagaimana tidak, format aturan tetap yang dipakai untuk matriks pembuatan laporan tersebut hingga kini belum ditentukan Pemkot Ambon. Menanggapi masalah tersebut, Anggota DPRD Kota Ambon, Muriami Dominggus mengatakan Pemkot Ambon mestinya menggunakan matriks aturan yang jelas, agar pembuatan laporan dana desa oleh raja atau pejabat dapat dikerjakan sesuai aturan. "Ya pasti bingung dong, karena untuk laporan dana desa saja, aturan yang ada sangat banyak, seperti Permen Nomor 113, Permendes 05 dan SK tiga Menteri menyangkut pelaporan ini. Tidak tahu mereka mau gunakan aturan yang mana," kata Dominggus kepada wartawan di Ambon, Kamis (28/1). Dia mengatakan akibat tidak adanya aturan yang pasti dari pemkot Ambon, waktu untuk pertanggungjawaban laporan dana desa dari masing-masing raja/kepala desa di Ambon melebihi target yang ditentukan. "Sesuai aturan, laporan ini mestinya dimasukan pada 31 desember kemarin. Tapi karena bingung dengan matriksnya, maka hingga kini laporan pertanggungjawaban belum juga dimasukan,"katanya. Dia menjelaskan dengan aturan yang jelas, raja/kepala desa akan dengan mudah melakukan pembuatan laporan-laporan tersebut. "Kalau aturan jelas maka tahapan akan jelas pula,"sebutnya. Dia berharap Wali Kota Ambon, Richard Louhepessy dapat melihat persoalan ini dan segera menentukan matriks yang dipakai untuk pelaporan dana desa tersebut. Sehingga dalam perkembangannya, raja ataupun pejabat negeri di kota Ambon tidak lagi menemukan hambatan seperti ini. (MG1)